

**ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya
pada Program Diploma III
Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi*

Oleh:
YUSDI
No. BP. 06077053



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
POLITEKNIK NEGERI PADANG
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia harus diikuti dengan serangkaian reformasi disektor publik. Reformasi sektor publik tersebut tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar cita-cita reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik tercapai. Pemerintah daerah diberi kewajiban dalam memperkuat perekonomian daerahnya, mengelola sumberdaya daerahnya dan pengelolaan keuangan daerahnya.

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu kabupaten yang terbaru dari 19 kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat. Secara geografi, Kabupaten Pasaman Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara di sebelah utara, sebelah selatan dengan Kabupaten Agam, sebelah timur dengan Kabupaten Pasaman, dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Ibukota Kabupaten Pasaman Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan terletak di Simpang Empat.

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasi selama satu tahun periode, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat bersama tim anggaran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah menganggarkan belanja, pendapatan, transper dan pembiayaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD). Adapun realisasi atau penggunaan dana yang tertuang dalam APBD harus didukung oleh suatu pertanggungjawaban.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban menyajikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah tercapai. Laporan keuangan yang biasa diterapkan pada akuntansi sektor publik yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu: (Mahmudi, 2007)

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemda dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan dari bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Dalam analisa perbandingan yang dilakukan pada priode tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2007 maka dapat dilihat pada neraca yaitu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan pada elemen-elemen atau pos-pos yang berada pada neraca tersebut.
2. Dari analisis modal kerja tahun 2007 dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memiliki modal kerja yang cukup baik dalam menjalankan operasi rutin hariannya. Pada tahun 2005 dan 2006 analisis modal kerja tidak dapat dihitung karena kabupaten ini belum memiliki kewajiban lancar yang disebabkan oleh Kabupaten Pasaman Barat baru berdiri pada tahun 2003.
3. Dari analisis rasio yang dilakukan terhadap neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 dapat diketahui bahwa pemerintah daerah ini masih memiliki kesehatan keuangan yang cukup baik dalam membayar semua kewajibannya. Untuk tahun 2005 dan 2006 analisis rasio tidak dapat dihitung karena kabupaten ini belum memiliki kewajiban yang disebabkan oleh Kabupaten Pasaman Barat baru berdiri pada tahun 2003.
4. Dari analisis Laporan Arus Kas tahun 2006 dan 2007 dapat diketahui bahwa aktivitas operasi bersaldo positif, aktivitas investasi bersaldo negatif, aktivitas

pembiayaan pada tahun 2006 bersaldo positif dan tahun 2007 bersaldo negatif dan analisis arus kas bebasnya bersaldo negatif. Pada tahun 2006 analisis arus kas bebas tidak dapat dihitung karena kabupaten ini baru pemekaran dari Kabupaten Pasaman pada tahun 2003.

5.2 Saran

Adapun saran dapat penulis berikan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan semakin meningkatkan penyusunan laporan keuangannya sehingga semua pengguna laporan keuangan mudah memahami laporan keuangan tersebut.
2. Mengingat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat belum melakukan analisis terhadap laporan keuangannya, maka untuk masa yang akan datang dilakukan analisis secara rutin. Analisis ini bertujuan sebagai salah satu acuan dalam menyusun anggaran dan perencanaan daerah sebelumnya.
3. Selain pihak legislatif, pihak eksekutif juga dapat menjadikan analisis laporan keuangan ini sebagai salah satu acuan dalam menetapkan anggaran dan merumuskan perencanaan daerah untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, (2006). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Erlangga.
- BPS, BAPPEDA Pasaman Barat (2008). *Pasaman Barat Dalam Angka 2008*, Simpang Empat:
- Halim, Abdul. (2007) *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat (Edisi ketiga).
- KSAP. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)-PP RI NO. 24 Tahun 2005*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: YPKN.
- Prasetya, Gede Edy. (2004). *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Soemarso, S.R. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat (Buku satu edisi lima, revisi).